

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pembinaan kompetensi aparatur dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian, maka Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 diupayakan terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jambi. serta harus menjadi acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, berupaya melakukan evaluasi dan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2021 dibuat oleh Tim Penyusun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan kompetensi aparatur.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Permendagri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi unit-unit dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dinas-Dinas Teknis. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. lembaga-lembaga teknis dan Rumah sakit daerah Provinsi Jambi
- k. Instruksi Gubernur Jambi. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu.
- l. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar mampu tetap tampil secara konsisten. responsive dan unggul pada persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. maka suatu instansi pemerintah harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut harus gradual.

konsisten dan berkelanjutan. sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu rencana yang menjelaskan mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut tujuan dari Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menjadi perekat dan pemersatu berbagai rencana kerja yang ada;
2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi selama satu tahun serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Rencana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun lalu, dan perkiraan capaian tahun berjalan., mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja BPSDM sudah disahkan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta

dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

C. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

D. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

E. BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Aparatur Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja optimalnya. hal ini ditandai dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tuntutan peningkatan kesejahteraan masih terus dirasakan dan didengarkan. Dalam memenuhi tuntutan ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, produktif, transparan, bebas KKN dan netral yang pada gilirannya dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan kepada semua pihak tanpa membedakan asal usul ataupun dari partai politik tertentu

Pada tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 pelaksanaan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang ditunjang dengan APBD murni untuk belanja langsung sebesar Rp. 24.008.913.469,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.609.703.993,-, Belanja barang dan Jasa semula sebesar Rp. 9.399.209.476,- Belanja modal Rp. 142.960.920,-.

Realisasi dari masing-masing belanja diprediksikan/direncanakan meliputi belanja pegawai sebesar Rp.14.000.000.000,-, Belanja barang dan Jasa semula sebesar Rp. 9.300.000.000,- Belanja modal Rp. 140.000.000,- sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.904.152.136	2.292.934.542,00	97,62	55.913.545,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.289.000	2.289.000	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	836.280.483	812.782.296	97,19	23.498.187,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.800.000	466.800.000	100,00	0,00
Penyediaan Alat tulis Kantor	54.943.500	54.943.500	100,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.921.014	24.800.625	95,68	1.120.389,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.335.950	23.335.950	100,00	0,00
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	38.066.600	37.914.574	99,60	152.026,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	65.050.000	64.738.444	99,52	311.556,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	229.374.800	206.248.600	89,92	23.126.200,00
Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah	355.958.700	354.331.553	99,54	1.627.147,00
Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	44.405.000	38.350.000	86,36	6.055.000,00
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	206.423.040	206.400.000	99,99	23.040,00

Tabel 2. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.117.077.965,00	1.103.551.024	98,79	13.526.941,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	394.335.668,00	384.131.834	97,41	10.203.834,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.000.000,00	74.560.000	99,41	440.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	201.857.797,00	200.980.097	99,57	877.700,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	245.996.500,00	244.601.093	99,43	1.395.407,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	199.888.000,00	199.278.000	99,69	610.000,00

Tabel 3. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0

Tabel 4. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Manajemen Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	586.361.578,00	576.327.271	98,29	10.034.307
Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	230.690.000,00	229.452.071	99,46	1.237.929
Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	60.484.176,00	60.299.500	99,69	184.676
Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	92.466.600,00	87.466.600	94,59	5.000.000
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	116.769.802,00	114.058.100	97,68	2.711.702
Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Pengembangan SDM Aparatur	85.951.000,00	85.051.000	98,95	900.000

Tabel 5. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	588.287.545,00	518.636.674	88,16	69.650.871
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	331.887.771,00	280.070.058	84,39	51.817.713
Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	102.848.689,00	100.077.781	97,31	2.770.908
Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	153.551.085,00	138.488.835	90,19	15.062.250

Tabel 6. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Pengembangan Kompetensi Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis
Inti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis Inti	570.853.897	523.224.187	91,66	47.629.710
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	69.543.434	58.998.314	84,84	10.545.120
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	154.897.583	146.205.393	94,39	8.692.190
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang	346.412.880	318.020.480	318.020.480	28.392.400

Tabel 6. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	924.038.538,00	863.344.070,00	93,43	60.694.468,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	84.860.175,00	79.668.700,00	93,88	5.191.475,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	836.280.483,00	812.782.296,00	90,48	16.155.130,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan	669.523.763,00	630.175.900,00	94,12	39.347.863,00

Fungsional				
------------	--	--	--	--

**Tabel 7. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Pengembangan Kompetensi Manajerial
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2020**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis Inti	1.075.394.510	1.052.313.590	97,85	23.080.920
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	231.048.570	213.650.500	92,47	17.398.070
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	80.000.000	74.392.150	92,99	5.607.850
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang	764.345.940	764.270.940	99,99	75.000

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan dan output yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, sampai dengan triwulan IV tahun 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.348.848.087,- atau sama dengan 31,39% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120,-. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 2.289.000,- atau sama dengan 0,10% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dari anggaran jasa surat menyurat II dapat direalisasikan sebesar Rp 2.289.000,- atau sama dengan 100% Yaitu antara lain digunakan untuk belanja Materai dan pengiriman surat-surat dinas yang sifatnya harus menggunakan jasa pengiriman surat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp. 836.280.483,- atau sama dengan 35,60% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 836.280.483,- dapat direalisasikan sebesar Rp 812.782.296,- atau sama dengan 97,19% yaitu untuk pembiayaan 2 rekening telephone, 1 Rekening Air dan 26 Rekening Listrik termasuk didalamnya biaya berlangganan TV kabel.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 466.800.000 atau sama dengan 19,87% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 466.800.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 466.800.000 atau sama dengan 100% yaitu digunakan untuk belanja jasa cleaning servis gedung kantor dan belanja jasa pembersihan dan perawatan halaman/taman.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 54.943.500,- atau sama dengan 2,34% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 54.943.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp 54.943.500,- atau sama dengan 100 % yaitu untuk pembelanjaan alat tulis kantor seperti kertas, kwitansi, name tag pegawai dan lain-lain sebagaimana terlampir.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan perkantoran, dari anggaran Rp. 25.921.014,- dapat direalisasikan sebesar Rp 24.800.625,- atau sama dengan 95,68% yaitu digunakan untuk belanja cetak seperti Kop surat, amplop, map, dll serta untuk belanja penggandaan.
- f. Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor Rp. 23.335.950,- atau sama dengan 0,99% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 23.335.950,- dapat direalisasikan sebesar Rp 23.335.950 atau sama dengan 100% antara lain digunakan untuk belanja alat-alat listrik atau penerangan gedung kantor.

- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 38.066.600,- atau sama dengan 1,62% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 38.066.600,- direalisasikan sebesar Rp. 37.914.574,- sama dengan 99,6% yang digunakan untuk belanja surat kabar/majalah dan belanja modal aset tetap lainnya seperti belanja buku perpustakaan.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 65.050.000,- atau sama dengan 2,77% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 65.050.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 64.738.444 atau sama dengan 99,52% antara lain digunakan untuk makan minum rapat rutin, makan minum tamu, dan penambah daya tubuh petugas keamanan.
- i. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/teknis perkantoran, dianggarkan sebesar Rp. 229.374.800,- atau sama dengan 9,67 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 239.354.800 dapat direalisasikan sebesar Rp 206.248.600 atau sama dengan 89,92% yaitu antara lain digunakan untuk pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium lainnya.
- j. Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 355.958.700,- atau sama dengan 15,55% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 390.958.700,- dapat direalisasikan sebesar Rp 354.331.553 atau sama dengan 99,54% yaitu antara lain belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan juga belanja Perjalanan dinas luar daerah.
- k. Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip, dianggarkan sebesar Rp. 44.405.000,- atau sama dengan 1,89 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 44.405.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 38.350.000 atau sama 86,36% yaitu untuk pembelanjaan biaya Honorarium Tim Pengelola Website BPSDM, Belanja jasa publikasi untuk ekspose, promosi dan dokumentasi kegiatan BPSDM pada media cetak dan elektronik, Belanja spanduk untuk kegiatan publikasi,ekspose,promosi dan dokumentasi lainnya, Belanja Cetak Banner, Belanja langganan surat kabar/majalah, Pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kediklatan Aparatur

- I. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor sebesar Rp. 206.423.040 atau sama dengan 8,79% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 206.400.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 129.600.000 atau sama dengan 99,99 % antara lain digunakan untuk honorarium petugas keamanan dan keperluan dari seraga petugas keamanan.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.117.077.965,- atau sama dengan 15,49% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.210.862.120,- Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 394.335.668,- atau sama dengan 35,30% dari total anggaran program peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 394.335.668,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 384.131.834 atau sama dengan 97,41% Yaitu digunakan antara lain untuk pembelanjaan pengadaan alat kantor, Pengadaan alat rumah tangga kantor, Pengadaan alat pendingin, Pengadaan peralatan visual studio dan pengadaan peralatan lainnya (terlampir).
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 75.000.000 atau sama dengan 6,71% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 75.000.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 74.560.000,- sama dengan 99,41% yang digunakan untuk pembelanjaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan serta Pembiayaan Honorarium petugas tenaga administrasi kantor BPSDM.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas sebesar Rp. 201.857.797,- atau sama dengan 18,07% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 201.857.797 dapat direalisasikan sebesar Rp 200.980.097,- atau sama dengan 99,57% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan Honorarium petugas supir, Pembelanjaan Jasa servis Kendaraan roda empat dan roda dua serta Pembiayaan atas Pajak Kendaraan bermotor kantor.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 245.996.500,- atau sama dengan 22,02% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 245.996.500,- dapat

direalisasikan sebesar Rp 244.601.093,- atau sama dengan 99,43% terealisasi, Yaitu digunakan untuk Pembiayaan petugas sound system dan elektronik lainnya, Petugas penjaga asrama/barak serta Pembelian pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.

- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp. 199.888.000 atau sama dengan 17,89% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 199.888.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 199.278.000,- atau sama dengan 99,69%, Yaitu digunakan untuk diantaranya Rehab rumah dinas, rehab ruang Arsip Kantor BPSDM, rehab ruang belajar 1 serta rehab saluran drainase kantor BPSDM.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran untuk program tidak ada anggaran dan kegiatan ini digunakan untuk Pembelian pakaian dinas harian pegawai BPSDM dan Pakaian seragam satpam beserta perlengkapannya tidak dilaksanakan diperuntukan dana refocusing dan rasionalisasi.

4. Program Manajemen Pelayanan Pengembangan SDM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 586.361.578,- atau sama dengan 8,13% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal sebesar Rp. 230.690.000,- atau sama dengan 39,34% dari total anggaran Program Manajemen Pelayanan Kediklatan. Dari anggaran Rp. 230.690.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 229.452.071 atau sama dengan 99,46%, yaitu diantaranya digunakan untuk keikutsertaan ASN internal dalam pengembangan SDM.
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD sebesar Rp. 60.484.176,- atau sama dengan 10,32 % dari total anggaran Program Manajemen Pelayanan Kediklatan. Dari anggaran Rp. 65.186.959 dapat direalisasikan sebesar Rp 60.299.500,- atau sama dengan 99,69% yaitu untuk pembelanjaan honorarium Operator LPPK/Teptra, belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat.

- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur sebesar Rp. 92.466.600 atau sama dengan 15,77% dari total anggaran Program Manajemen Pelayanan Kediklatan. Dari anggaran Rp. 92.466.600 dapat direalisasikan sebesar Rp 87.466.600 atau sama dengan 94,59%, yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelian pengadaan materi kit, naskah paparan dan hasil, Pembiayaan Honorarium Narasumber dan Moderator, Pembiayaan Dokumentasi/Publikasi serta Pembiayaan makan dan minum peserta rapat, Narasumber dan tamu pusat.
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat sebesar Rp. 116.769.802,- atau sama dengan 19,91% dari total anggaran Program Manajemen Pelayanan Kediklatan. Dari anggaran Rp. 116.769.802,- dapat direalisasikan sebesar Rp 114.058.100 atau sama dengan 97,68% Yaitu digunakan untuk monitoring evaluasi OL dan benchmarking dan monitoring pasca diklat.
- e. Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Pengembangan SDM Aparatur sebesar Rp. 85.951.000,- atau sama dengan 14,66% dari total anggaran Program Manajemen Pelayanan Kediklatan. Dari anggaran Rp. 85.951.000,- direalisasikan sebesar Rp. 85.051.000 atau sama dengan 98,95% Yaitu digunakan untuk kegiatan penyusunan jurnal ilmiah beserta seminar jurnal yang disusun oleh widyaiswara BPSDM Provinsi Jambi.

7. Program Sertifikasi Kompetensi dan pengembangan Kelembagaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 588.287.545,- atau sama dengan 8,16% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Sertifikasi Kompetensi sebesar Rp 331.887.771,- atau sama dengan 56,42% dari total anggaran Pogram Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan, dari anggaran Rp. 331.887.771,- dapat direalisasikan sebesar Rp 280.070.058 atau sama dengan 84,39%, yaitu digunakan untuk uji kompetensi bagi pengawas untuk 25 orang dan uji kompetensi bagi administrator untuk 30 orang dan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk 40 orang
- b. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi sebesar Rp 102.848.689,- atau sama dengan 17,48% dari total anggaran Pogram

Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan, dari anggaran Rp. 102.848.689,- dapat direalisasikan sebesar Rp 100.077.781 atau sama dengan 97,31%, yaitu digunakan untuk Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dan Studi Tiru Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi

- c. Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama sebesar Rp 153.551.085 atau sama dengan 26,10% dari total anggaran Pogram Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan, dari anggaran Rp. 153.551.085 dapat direalisasikan sebesar Rp 71.22.475 atau sama dengan 46,51 %, yaitu digunakan untuk Lanjutan Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi bagi Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Kab/Kota untuk 25 orang, Workshop Kerjasama Pengembangan Kompetensi untuk 40 orang.

8. Program Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 570.853.897,- atau sama dengan 7,9% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan dengan dana sebesar Rp. 69.543.434 atau sama dengan 12,07% dari total anggaran Pogram Pengembangan Kompetensi Inti, dari anggaran Rp. 69.543.434 telah direalisasikan sebesar Rp. 58.998.314 atau 84,84% yang digunakan untuk Pelatihan Dasar Manajemen Bencana sebanyak 30 peserta.
- b. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan dengan dana sebesar Rp. 154.897.583,- atau sama dengan 27,13% dari total anggaran Pogram Pengembangan Kompetensi Inti, dari anggaran Rp. 154.897.583,- direalisasikan sebesar Rp. 146.205.393 atau 94,39% digunakan untuk Pelatihan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebanyak 30 peserta dan Pelatihan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) sebanyak 20 orang.
- c. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang dengan dana sebesar Rp. 346.412.880,- atau sama dengan 60,68% dari total anggaran Pogram Pengembangan Kompetensi Inti, dari anggaran Rp. 345,392,880,- direalisasikan sebesar Rp. 318.020.480 atau 91,8% digunakan untuk Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelatihan Kewirausahaan

Purna Bhakti bagi ASN.

9. Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 924.038.538,- atau sama dengan 12,81% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi dengan dana sebesar 84.860.175,- atau sama dengan 9,18% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, dari anggaran Rp. 84.860.175,- direalisasikan sebesar Rp. 79.668.700 atau sama dengan 93,88% digunakan untuk Pelatihan Perlindungan Anak dan Wanita bagi ASN seb anyak 25 orang.
- b. Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi dengan dana sebesar 836.280.483,- atau sama dengan 18,36% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, dari anggaran Rp. 836.280.483,- telah direalisasikan sebesar Rp. 812.782.296 sama dengan 90,48% digunakan untuk Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Kompetensi bagi ASN seb anyak 25 orang dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pejabat Administrasi Damkar sebanyak 25 orang.
- c. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dengan dana sebesar Rp. 669.523.763 atau sama dengan 72,46% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, dari anggaran Rp. 669.523.763 telah direalisasikan sebesar Rp. 630.175.900 atau 94,12% digunakan untuk Pelatihan Polisi Pamong Praja, Pelatihan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Pelatihan Penyuluh Pertanian masing-masing sebanyak 25 orang.

10. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.075.394.510,- atau sama dengan 14,91% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 7.010.862.120. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dengan dana sebesar Rp. 231.123.625 atau sama dengan 21,49% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Manajerial, dari anggaran sebesar Rp. 231.123.625 direalisasikan sebesar Rp. 213.650.500 atau 92,47% digunakan untuk Workshop Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan sebanyak 50 orang peserta.
- b. Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dengan dana sebesar 80.000.000,- atau sama dengan 7,44% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Manajerial, dari anggaran Rp. 80.000.000 direalisasikan sebesar Rp. 74.392.150 atau 92,99% digunakan untuk Seminar Inovasi Pelayanan Publik bagi Kepala OPD sebanyak 50 orang peserta.
- c. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan dengan dana sebesar 764.270.940 atau sama dengan 71,08% dari total anggaran Program Pengembangan Kompetensi Manajerial, dari anggaran Rp. 764.270.940 dapat direalisasikan sebesar Rp 764.345.940 atau sama dengan 99,9 %, yaitu digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I massing-masing untuk 30 orang peserta.

Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target kinerja dan realisasi keuangan dengan menata sistem perencanaan dan menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dan menganalisis atas capaian kinerja program dan kegiatan sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penunjang, dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja pelayanan BPSDM tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci dari Kementerian.

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

No	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	98 %	99 %	100 %	91 %	92 %	
2	Persentase Peserta <i>Lulus Uji Kompetensi</i>	72 %	73 %	74 %	0 %	73 %	74 %	
3	Masyarakat / Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat	82 %	83 %	84 %	100 %	81 %	82 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral Pembangunan Nasional. selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor nasional di daerah. juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran sektoral nasional di daerah. serta tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah.

Desentralisasi secara tegas memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan kata lain. porsi daerah untuk menentukan berbagai kebijakan publik sesuai dengan konteks daerahnya menjadi semakin besar. Pada saat yang sama. dinamika sosial. politik dan ekonomi dalam skala lokal maupun nasional akan terus berubah. Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta para stakeholders lainnya yang juga terus berubah dan harus direspon oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik di Provinsi Jambi dewasa ini menjadi isu dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan diterbitkannya dan diberlakukannya berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. maka perbaikan kinerja pelayanan aparatur yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen pemerintahan yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu. perbaikan kinerja pelayanan bidang aparatur juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*). dan legitimasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sehingga mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan aparatur yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan

manajemen pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur. memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. sebagaimana yang sebelum tahun 2017 diatur pada Peraturan Gubernur Jambi. nomor 31 Tahun 2008. dengan nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk tahun 2017 sejalan dengan pergantian nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. atau disebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPSDM Provinsi dalam melaksanakan tugas. menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis. rencana. dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan. evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Isu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah di Provinsi Jambi. Hal ini tercermin dari perolehan *Nilai SAKIP* Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan Kementerian

PAN & RB dapat juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah tingkat profesionalitas aparatur pemerintah daerah kemampuan penegakan hukum dan peraturan. kapasitas pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

Sedangkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui musrenbang / rapat koordinasi pada urusan pembangunan secara umum khususnya untuk bidang Aparatur yang merupakan domain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan. diantaranya; 1) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur. 2) kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu terus ditingkatkan. 3) rendahnya kesejahteraan pegawai. 4) belum optimalnya kinerja aparatur baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. kecamatan dan kelurahan/desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan namu terdapat perbedaan pada pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan pada BPSPDM Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih dapat mengalami perubahan karena pertimbangan program dan kegiatan prioritas serta hasil capaian pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 Program dan Kegiatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi PD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2021			
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN									
4	0521		BIDANG KEPEGAWAIAN									
			<u>PROGRAM:</u> <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	97,31	97,31	100%	34,23%	100%
			<u>Kegiatan 1 :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100%	100%	100%	93,34	93,34	100%	26,87	100%
			<u>Kegiatan 2 :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna	100%	100%	100%	97,92	97,92	100%	36,93	100%

				Kegiatan 8 : Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	100%	100%	100%	84,37	84,37	100%	45,94	100%
				Kegiatan 9 : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	100%	100%	100%	97,31	97,31	100%	31,61	100%
				Kegiatan 10 : Pelayanan Pelayan Administrasi Barang	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKP	100%	0%	0	97,31	0	0	35,02	0
				Kegiatan 11 : Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	60 Bln	100%	100%	93,34	99,96	100 %	28,54	100 %
				Kegiatan 12 : Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	60 Bln	0%	100%	90,95	90,95	100 %	47,09	100 %
				Kegiatan 13 : Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin	60 Bln	0%	0	0	0	0	26,87	0

					Kegiatan 9 : Penyediaan Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	100 %	0%	-	94,98	0	100 %	0	0
					Kegiatan 10 : Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rehab dan Pembangunan Kantor	Jumlah dan jenis Jasa yang dibutuhkan guna pelaksanaan rehab dan pembangunan gedung kantor	100 %	0%	100 %	-	0	0	0	0
					Kegiatan 11 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	100 %	100%	100 %	-	0	100 %	100 %	100 %
					PROGRAM: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	100%	96%	100%	-	0	100%	100%	100%
					Kegiatan 1 : Pengadaan Pakaian Dinas	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	100%	105 Org	105 Org	105 Org	105 Org	0	0
					Kegiatan 2 : Pengadaan Pakaian Tradisional Melayu Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	0%	105 Org	-	0	0	0	0

				Kegiatan 3 : Pengadaan pakaian batik Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	0%	105 Org	-	0	0	0	0
				PROGRAM: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Internal	-	100%	100 %	-	0	-	-	-
				Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	-	100%	25 Org	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	-	-	1 Lbg	-	0	-	-	-
				PROGRAM : Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-		100 %	100 %	100 %	-	-	-
				Kegiatan 1 : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-	100%	3 Dkm	100%	100%	-	-	-

				Ilmiah Kediklatan	Ilmiah Kediklatan								
				Kegiatan 7 : Penyelenggaraan seminar/lokakarya/worksh op pengembangan program dan kegiatan BPSDM			100%				-	-	-
				PROGRAM: Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100 %	100%	97 %	99,56	99,56	-	-	-
				Kegiatan 1 : Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Lembaga	Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi	1.240 org	106	230 orang	140	100%	-	-	-
				Kegiatan 2 : Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Aparatur	1.520 Org	236	290 Org	270	100%	-	-	-
				Kegiatan 3 : Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	3.240 Org	270	690 Org	310	44,93	-	-	-
				Kegiatan 4 : Pengembangan Kompetensi Manajerial	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur	4.188 Org	220	250 Org	204	98,92	-	-	-
				PROGRAM: Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	75%	-	72%	72%	-		72%	72%

				Kelembagaan									
				Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN		-	-	30 orang	30 orang	-	-	-	-
				Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN		-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-
				Kegiatan 3 : TOT Pempindagri		-	-	21 orang	21 orang	-	-	-	-
				Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota		-	-	11 kab./kota	11 kab./kota	-	-	-	-
				Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga		-	-	30 orang x 2 kali visitasi	30 orang x 2 kali visitasi	-	-	-	-
				Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)		-	-	25 orang	25 orang	-	-	-	-
				Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi		-	-	11 kab./kota	11 kab./kota	-	-	-	-
				Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/M odul		-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-

				Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PElatihan		-	-	11 kab/kota	11 kab/kota	-	-	-	-
				Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi		203 Org	-	-	-	-	99 orang		
				Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi		203 Org	-	-	-	-	1x studi tiru dan monev		
				Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama		203 Org	-	-	-	-	50 orang		
				PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100 %	-	97 %	97 %	-	99		
				Kegiatan 1 : Diklat Teknis Inti pengelolaan Keuangan Desa	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 2 : Diklat Kewirausahaan purna bhakti bagi ASN	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 3 : Diklat Pengembangan Pariwisata	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 4 : Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-

				Kegiatan 5 : Diklat Perencanaan Penganggaran	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 6 : Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis Inti	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	11 kab./kota	11 kab./kota	-		-	-
				Kegiatan 7 : Diklat Pengelolaan Aset daerah	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 8 : Diklat Kearsipan	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 9 : Diklat Teknis Pemandu Wisata	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 10 : Diklat Teknis Sanitasi Lingkungan	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 11 : Diklat Teknis Penilaian Koperasi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	25 orang	25 orang	-		-	-
				Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	133 org	-	-	-	-		25 orang	0

				Kegiatan 10 : Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi ASN	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	30 orang	30 orang	-		-	-
				Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	-	-	-		25 Org	0 Org
				Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	-	-	-		50 Org	0 Org
				Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		-	-	-	-		93 Org	60 Org
				PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik		-	-	-	-		-	-
				Kegiatan 1 : Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 2 : Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XII	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-

				Kegiatan 3 : Pelatihan Dasar bagi CPNS Provinsi Jambi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 4 : Diklat Peningkatan kapasitas Camat	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 5 : Diklat Peningkatan kapasitas Lurah	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 6 : Diklat Komunikasi dan Public Speaking	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 7 : Diklat Manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi pejabat eselon III/IV	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 8 : Diklat Manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 9 : Diklat Pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik			30 orang	30 orang			-	-
				Kegiatan 10 : Pengembangan	Peserta yang dinyatakan selesai dan	217 Org	-	-	-	-		80 Org	0 Org

				Kompetensi Pimpinan Daerah	lulus dengan nilai baik								
				Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	217 Org	-	-	-	-		30 Org	0 Org
				Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	217 Org	-	-	-	-		60 Org	60 Org

Tabel 11. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 BPSDM PROVINSI JAMBI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan • Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catat an Penti ng
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provi nsi Jamb i	persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		386,69 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provi nsi Jamb i	persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	344,77 7	
2	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan		56,310	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan	100%	117,16 7	
	• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				59,897	•					
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja		97,870	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	100%	40,432	
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		172,61 7	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		187,17 7	

			Pengembangan SDM Aparatur)					Pengembangan SDM Aparatur)			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium administrasi keuangan dan lainnya		14,141,538	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium administrasi keuangan dan lainnya	100		
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		13,935,215	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14,307,573	
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		• % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD • % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD • % Tingkat pemenuhan		206,323,000	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		• % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD • % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD • % Tingkat pemenuhan	100%	273,993	

			honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD					honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase peningkatan kapasitas internal aparatur BPSDM		244,41 6,490	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase peningkatan kapasitas internal aparatur BPSDM	100%	284,18 3	
	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		persentase pengembangan kapasitas aparatur internal		244,41 6,490	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	100%	284,18 3	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelayanan bidang pengembangan SDM		509,51 6,450	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelayanan bidang pengembangan SDM	100%	592,33 5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		% penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan		38,489, 130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		% penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	67,723	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		% penyediaan alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas % penyediaan kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor		88,940, 140	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		% penyediaan alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas % penyediaan kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	100%	139,57 5	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		% penyediaan kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas		39,992,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		% penyediaan kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	100%	42,942	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		% penyediaan barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan		26,808,980	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		% penyediaan barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	26,808	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		% keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah		315,286,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		% keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	100%	315,286	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,327,020,048	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,327,420	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		% penyediaan kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas		3,596,472	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		% penyediaan kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100%	3,596	
	Penyediaan Jasa		% Penyediaan		640,25	Penyediaan Jasa		% Penyediaan	100%	640,25	

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas		2,200	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas		2	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		% pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan publikasi		13,722,376	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		% pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan publikasi	100%	14,122	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		% pembayaran jasa keamanan kantor % penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor		669,449,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		% pembayaran jasa keamanan kantor % penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	100%	669,449	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		703,274,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	589,874	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan		224,360,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	224,360	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		% penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung		278,954,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		% penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung	100%	165,554	

			kelancaran tugas kedinasan				kelancaran tugas kedinasan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		persentase pemeliharaan dan rehab bagian gedung kantor yang rusak		199,960,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan dan rehab bagian gedung kantor yang rusak	100%	199,960	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4,210,269,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6,288,756	
	Pengembangan Kompetensi Teknis		persentase peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik		1,318,987,792	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik		1,761,452	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM teknis		1,318,987,792	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM teknis		1,761,452	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Peserta Lulus Uji Kompetensi		2,891,281,208	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Lulus Uji Kompetensi		4,527,303	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan pelatihan yang		263,516,380	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan pelatihan yang		706,805	

	Provinsi dan Kabupaten/Kota		dinyatakan lulus			Kabupaten/Kota		dinyatakan lulus			
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN		184,114,700	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN		191,152	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota Jumlah peserta pelatihan		178,089,540	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota Jumlah peserta pelatihan		178,089	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional		2,265,560,588	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional		3,451,256	
					21,522,730,200						

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum PD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPSDM. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi seperti tersaji dalam Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 12. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2020**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Target	Rupiah (000)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Provinsi Jambi	persentase peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100%	6,288,756	
2	Pengembangan Kompetensi Teknis		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM teknis	420 orang	1,761,452	
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peserta Lulus Uji Kompetensi	420 org	1,761,452	
4	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan pelatihan yang dinyatakan lulus	237 orang - 468 org	4,527,303	
5	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	237 orang	706,805	Perlu peningkatan anggaran sesuai dengan SBU
6	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota Jumlah peserta pelatihan	1 kali	191,152	

7	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
8	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	1 kali	178,089	
	445 orang	3,451,256	

BAB III

TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Kebijakan Nasional Bidang Kepegawaian khususnya Pendidikan dan Pelatihan :

Tabel 13. Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Jenis Kebijakan Nasional / Provinsi
1	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah <i>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> o Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik
2	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> - Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik
3	<i>Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> - Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi - Penataan kelembagaan instansi pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi - Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah - Pengembangan manajemen SDM Aparatur - Sistem Seleksi PNS melalui <i>CAT System</i> - Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i> - Penerapan <i>e-Arsip</i> - Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur
4	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> - Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik - Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik

	- Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama. perijinan dan investasi - Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi - Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional
--	--

Khusus dibidang aparatur yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah dengan pengembangan manajemen SDM aparatur berupa *peningkatan sistem merit* dalam manajemen kepegawaian. serta *peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai*. Adapun indikator untuk penerapan sistem merit adalah berupa persentase penerapan sistem merit di setiap instansi. Sedangkan indikator untuk peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai berupa persentase pegawai yang mengikuti assesment sesuai kebutuhan. persentase pegawai yang mengikuti diklat wajib dan persentase penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja.

Sedangkan hasil perumusan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih. Transparan. Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik.*** kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang tujuannya “mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel” dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelola dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pengelolaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Strategi meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur arah kebijakannya adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur

melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan suatu program dan kegiatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan (*never ending process*). Untuk itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembaharuan guna meningkatkan kompetensi aparatur, merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya kebijakan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dalam rangka pembaharuan secara esensial menjadi *leverage* yang berbasis kompetensi. Maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T u j u a n

- a. Mengembangkan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur yang efektif
- b. Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur

S a s a r a n

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni;

- a. Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui program dan kegiatan yang relevan sesuai dengan kebutuhan
- b. Meningkatnya sumber daya kediklatan yang memadai

3.3. Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 24.146.991.389.- (dua puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh

Sembilan rupiah). Adapun rincian program dan kegiatan dari Belanja Langsung sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BPSDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja BPSDM Provinsi Jambi tahun 2021
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021, pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih. Transparan. Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik.*** Kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Dalam Misi ke -1 RPJMD Provinsi Jambi tujuan yang hendak dicapai oleh BPSDM Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun depan

adalah *Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas*

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. indikator kinerja utama BPSDM :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Peserta Pengembangan SDM yang dinyatakan telah selesai dan <i>lulus dengan nilai minimal baik</i>	-	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %
2	Persentase Peserta <i>Lulus Uji Kompetensi</i>	-	-	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %
3	Peserta Pengembangan SDM yang <i>menyatakan minimal puas terhadap pelayanan pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur</i>	-	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

Tabel 15. RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BESERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Provinsi Jambi			APBD			
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Provinsi Jambi			APBD			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peserta Pengembangan SDM yang <i>menyatakan minimal puas terhadap pelayanan penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur dan sarana prasaran</i>	Provinsi Jambi	80%	17.863.118.098	APBD		81,0%	31.195.000.000
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	100%	344.777.020	APBD		100%	525.000.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Provinsi Jambi		117.167.120	APBD		100%	180.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	Provinsi Jambi		40.432.100	APBD		100%	60.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan)	Provinsi Jambi		187.177.800	APBD		100%	285.000.000

		Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah							
8			Provinsi Jambi			APBD			
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	100%	14.581.566.993	APBD		100%	16.350.000.000
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi		14.307.573.993	APBD			16.000.000.000
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara, % tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website	Provinsi Jambi		273.993.000	APBD			350.000.000
12			Provinsi Jambi			APBD			
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	Provinsi Jambi	100%	284.183.410	APBD		100%	100.000.000
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	Provinsi Jambi		284.183.410	APBD		100%	100.000.000

	dan Fungsi								
15			Provinsi Jambi			APBD			
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD	Provinsi Jambi	100%	735.296.627	APBD		100%	1.060.000.000
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi		67.723.295	APBD		100%	160.000.000
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi		282.536.152	APBD		100%	200.000.000
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi		42.942.000	APBD		100%	200.000.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Jambi		26.808.980	APBD		100%	100.000.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi		315.286.200	APBD		100%	400.000.000
22			Provinsi Jambi			APBD			
23			Provinsi Jambi			APBD			
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Provinsi Jambi	100%	1.327.420.048	APBD		100%	1.760.000.000
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	100%	3.596.472	APBD		100%	10.000.000
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Provinsi Jambi	100%	640.252.200	APBD		100%	800.000.000

		dan Listrik							
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	100%	14.122.376	APBD		100%	100.000.000
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jambi	100%	669.449.000	APBD		100%	850.000.000
29			Provinsi Jambi			APBD			
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	Provinsi Jambi	100%	589.874.000	APBD		100%	900.000.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	100%	224.360.000	APBD		100%	300.000.000
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	100%	165.554.000	APBD		100	300.000.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	100%	199.960.000	APBD		100%	300.000.000
34			Provinsi Jambi			APBD			
35	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	Provinsi Jambi	90%	4.639.832.189	APBD		93%	10.500.000.000
		2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta	Provinsi Jambi	71%		APBD		72%	

		pengembangan kompetensi							
36	Pengembangan Kompetensi Teknis	jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	Provinsi Jambi		-	APBD		420 orang	3.500.000.000
37	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	Provinsi Jambi	420 orang	1.765.639.246	APBD			
			Provinsi Jambi			APBD			
38	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	Provinsi Jambi	237 orang - 468 orng	4.639.832.189	APBD		237 orang - 468 orng	7.000.000.000
39	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	Provinsi Jambi	237 orang	706.805.204	APBD			
40	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	Provinsi Jambi	1 kali	191.152.700	APBD			
41	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota	Provinsi Jambi	1 kali	178.089.540	APBD			
42		Jumlah peserta pelatihan	Provinsi Jambi	25 orang		APBD			

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	Provinsi Jambi	445 orang	3.563.784.745	APBD				
--	---	--	----------------	-----------	---------------	------	--	--	--	--

BAB IV

P E N U T U P

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas peserta dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi *pencapaian* hasil. pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan sinergitas dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program dengan unit-unit kerja/instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat. provinsi. kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. maka Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat dijadikan bahan kajian sehingga keberadaannya dapat mendukung Pemerintahan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2021

KEPALA BADAN

H.M.ISKANDAR NASUTION.SH.M.SI

Pembina Utama Madya

NIP. 19650331 199403 1 006